



2022

L K j I P

✉ diskominfo.sampangkab.go.id

🌐 diskominfo@sampangkab.go.id

☎ (0323) 321550/325987

📄 69216



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pengantar



Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Sampang. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LkjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang



AMRIN HIDAYAT, S.Kom., M.A.P.

Pembina

NIP. 19721026 200501 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Struktur organisasi	3
B. Tugas dan fungsi	6
C. Isu strategis.....	10
D. Cascading kinerja.....	10
E. Aspek strategis dan permasalahan perangkat daerah	11
F. Peta proses bisnis	12
G. Realisasi anggaran.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	21
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	21
B. Perjanjian kinerja	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	25
A. Capaian Kinerja	25
B. Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi anggaran	36
Bab IV Penutup	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi, meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai.

Selain pencapaian target tahun 2022, laporan kinerja tahun 2022 ini juga merupakan langkah tahun ke 4 (empat) pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra 2019 – 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidak-capaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

1

Meningkatnya Penerapan e-Government

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	50%	48,28%	96,56

2

Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	60%	78,22%	130,36



BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perubahannya. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-

masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah menyusun sebuah laporan guna mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut beserta capaiannya bertujuan untuk :

1. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sekaligus peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sendiri;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi setiap program dan kegiatan-kegiatan Dinas;
3. Menciptakan *self-assessment* (penilaian diri) yang diharapkan akan memberikan koreksi, perbaikan dan dorongan (*feed back*) untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

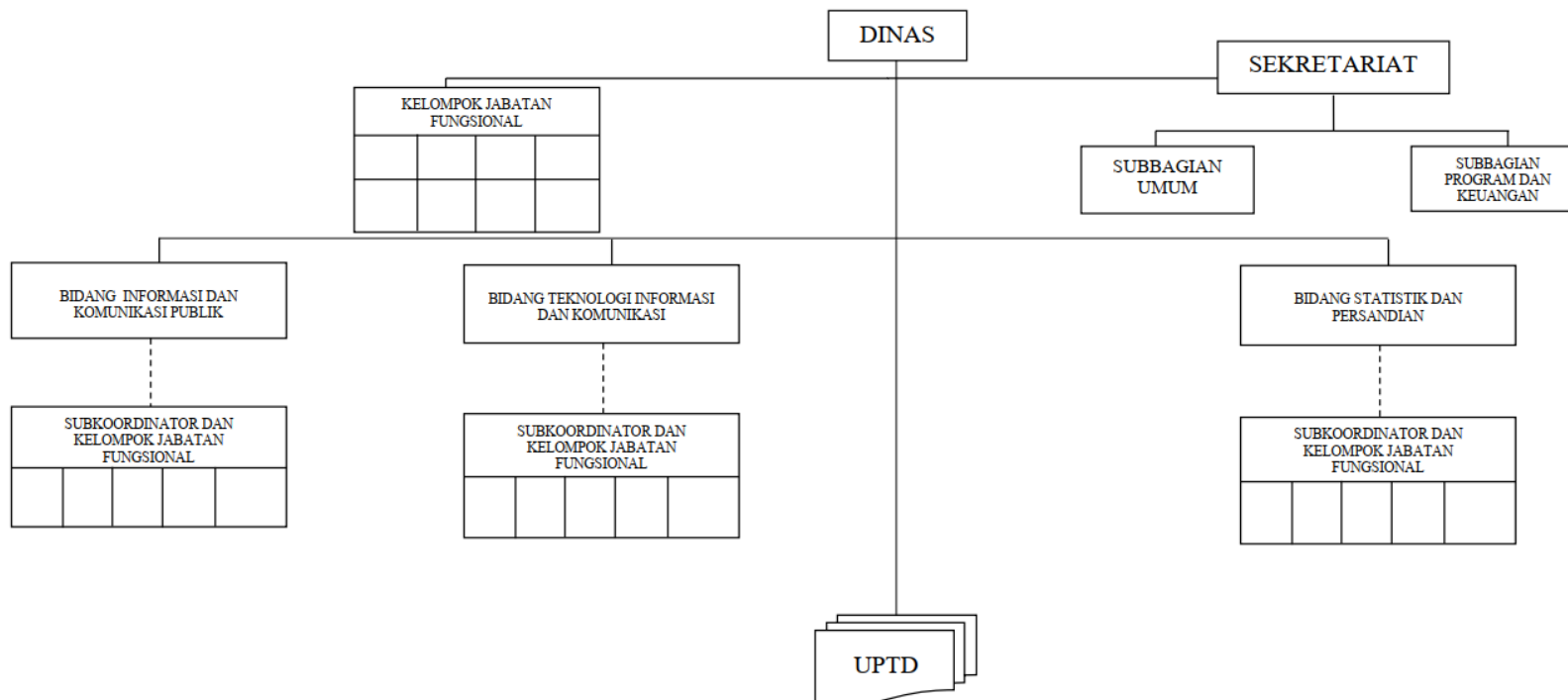
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Sampang;
2. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, untuk kemudian diharapkan dapat memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG



1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

6. UPTD Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang terbagi secara terinci yang terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*);
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusankepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*); dan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Perencanaan, perumusan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi media publik dan opini publik;
- e. Pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan nasional/daerah;
- f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan/atau penilaian kelompok informasi masyarakat;
- g. penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kemitraan media lokal, media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknolgi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Keamanan Data Pemerintah Kabupaten Sampang;
- d. pelaksanaan payanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

- e. pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi *generik, spesifik* dan Suplemen yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*;
- g. pelaksanaan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- h. pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*;
- i. pelaksanaan layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Sampang;
- j. pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian statistik, persandian dan keamanan informasi, dan pengolahan data dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan urusan dibidang statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dibidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

f. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD)

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan.

C. ISU STRATEGIS

Hasil analisa isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua Perangkat Daerah (belum sampai tingkat kecamatan dan desa);
- b. Konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website, sehingga website terupdate secara berkala;
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat; dan
- d. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK.

D. CASCADING KINERJA

Berdasarkan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



E. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebagai Tupoksi Dinas saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya yang menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan pembangunan e-Government. Tantangan utama pengembangan e-Government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Infrastruktur komunikasi data dan informasi infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Sehubungan dengan pengembangan e-government langkah awal yang dilaksanakan adalah memfasilitasi akses informasi elektronik berupa website pemerintah daerah. Saat ini website Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sudah dapat digunakan dan diakses oleh pengguna yang manfaatnya masih belum dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan design tiap saat tentu memerlukan pembaharuan sehingga kandungan berita di dalamnya tetap ter-update. Masyarakat sudah dapat memanfaatkan website Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini dengan alamat www.sampangkab.go.id.

Berdasarkan kebutuhan informasi dan komunikasi berbasis elektronik kiranya berbagai hambatan yang timbul antaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah yang aktif yang memenuhi standar TI sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD 2. konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website 3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat 	<p>Faktor Internal: Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo</p> <p>Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan website OPD yang memenuhi standar konten dan integrasi data</p>
2.	Persentase Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti sudah tercapai 100% namun dalam pelayanan PPID masih konvensional belum berbasis TIK	Pelayanan PPID belum berbasis TIK	<p>Faktor Internal: Belum direncanakan pengembangan pelayanan PPID berbasis TIK</p> <p>Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public yang berbasis TIK</p>
3.	Persentase OPD/ Lembaga yang menerima penyebarluasan media informasi sudah tercapai 100% namun media informasi belum berbasis TIK	Media informasi belum berbasis TIK	<p>Faktor Internal: Belum direncanakan pengembangan media informasi berbasis TIK</p> <p>Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam memanfaatkan TIK</p>
4.	Persentase KIM berbasis TIK sudah tercapai 70% namun website belum sepenuhnya aktif	Website sebagai media informasi KIM belum optimal	<p>Faktor Internal: Belum memanfaatkan secara optimal potensi komunikasi yang ada di masyarakat</p> <p>Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TIK</p>
5.	Persentase data statistik di publikasikan dan tepat waktu sudah mencapai 100% namun dalam publikasi data statistic belum berbasis TIK	Publikasi data statistic belum berbasis TIK	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM yang berbasis TIK</p> <p>Faktor Eksternal: Data sektoral di Perangkat Daerah belum berbasis TIK</p>

Sumber : P-Renstra Diskominfo, 2022

F. PETA PROSES BISNIS

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien

antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

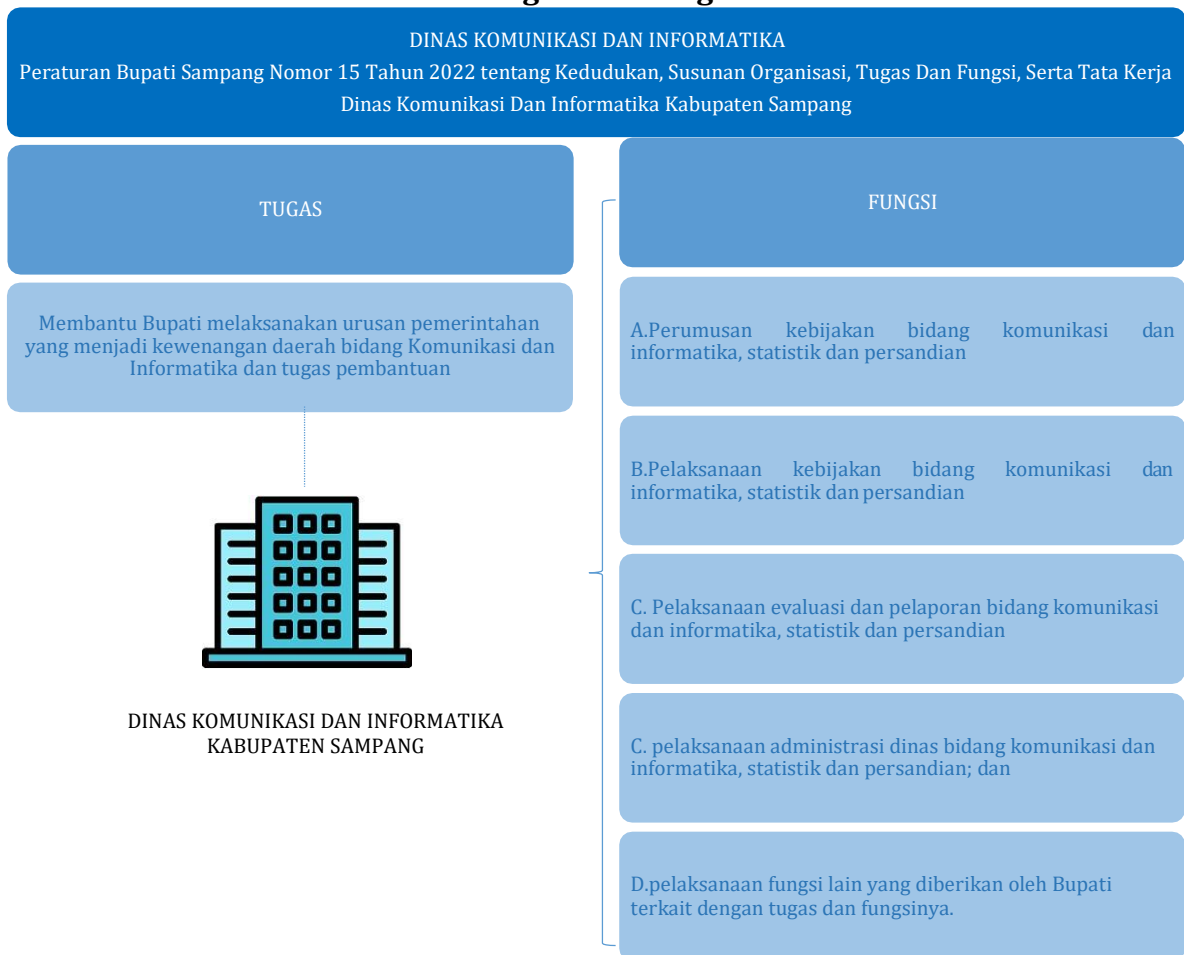
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

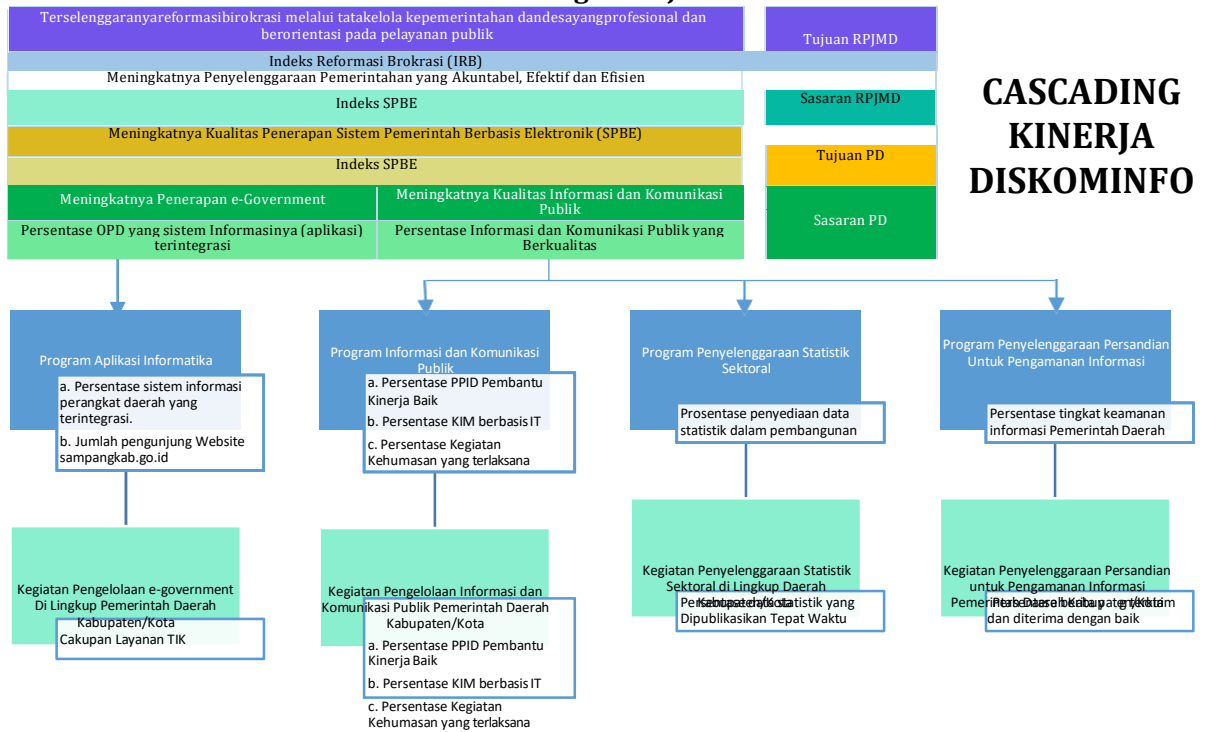
Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang :

Gambar 1.1.
Tugas dan Fungsi



Gambar 1.2.
Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang

Gambar 1.4.
Cascading Kinerja



Gambar 1.5.
INTI PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 1.6. Perbandingan Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi

PROSES BISNIS

RELEVAN

STRUKTUR ORGANISASI

Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Peningkatan Penerapan e-Government

Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan aplikasi informatika

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Publik

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Membangun Metadata Statistik Sektoral

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabup

Program aplikasi informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sekretarat Diskominfo

Bidang Teknologi dan Informatika

Bidang infomarmasi dan Komunikasi Publik

Bidang Statistik dan Persandian

G. REALISASI ANGGARAN

Gambar 1.7.
REALISASI ANGGARAN BAGIAN PER 31 DESEMBER 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA LANGSUNG	18.233.380.761	17.655.812.295	96,83
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.065.633.568	17.488.591.345	96,81
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.675.484.514	5.187.421.034	91,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.304.409	9.071.350	97,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	987.450,00	986.950,00	99,95
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	989.009,00	987.500,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	988.459,00	987.000,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	984.425,00	983.900,00	99,95
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	989.925,00	988.000,00	99,81
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.365.141,00	4.138.000,00	94,80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.389.462.436,00	2.904.992.227,00	85,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.385.922.482,00	2.901.472.627,00	85,69
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.977,00	2.980.000,00	99,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	539.977,00	539.600,00	99,93
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.189.866	1.188.000	99,84
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	539.977	539.000,00	99,82
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	649.889	649.000,00	99,86
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.451.743.832	1.450.172.678	99,89
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.451.743.832	1.450.172.678,00	99,89
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.121.146	424.927.919	99,95
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.783.345	17.773.000,00	99,94

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.443.834,00	35.375.000,00	99,81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.392.989,00	43.357.500,00	99,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.432.650	39.432.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.268.328,00	270.190.419,00	99,97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.702.825	254.547.860	99,94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.702.825,00	179.547.860,00	99,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.960.000	142.521.000	99,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.300.000,00	66.861.000,00	97,89
	Pemeliharaan Mebel	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.200.000,00	42.200.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.458.115.000	1.446.341.820	99,19
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.458.115.000	1.446.341.820	99,19
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.450.062.980,00	1.438.534.420,00	99,20
	Pelayanan Informasi Publik	5.517.020,00	5.380.400,00	97,52
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.535.000,00	2.427.000,00	95,74
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	10.932.034.054	10.854.828.491	99,29
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.932.034.054	10.854.828.491	99,29
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	8.269.838.629,00	8.194.809.485,00	99,09
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.662.195.425,00	2.660.019.006,00	99,92

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	132.184.100,00	131.939.000,00	99,81
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	132.184.100	131.939.000	99,81
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	132.184.100	131.939.000	99,81
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	94.627.050,00	94.469.000,00	99,83
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	37.557.050,00	37.470.000,00	99,77
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	35.563.093	35.281.950	99,21
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	35.563.093	35.281.950	99,21
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.563.093	35.281.950	99,21
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.563.093,00	35.281.950,00	99,21

1.7. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Diskominfo Kabupaten Sampang Tahun 2022 atas Implementasi SAKIP Diskominfo Kabupaten Sampang tahun 2021 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- 2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran agar memacu pada dokumen Renstra;
- 3) Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.

b. Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran

Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja secara

berjenjang dari level staf hingga level tertinggi.

2) Implementasi Pengukuran

Memonitor pencapaian target kinerja eselon III dan IV

c. Pelaporan Kinerja

Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

d. Evaluasi Internal

- 1) Lakukan pemanauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- 2) Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk peningkatan implementasi SAKIP.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yang mengacu pada *Visi Bupati Sampang* yaitu **“SAMPANG HEBAT BERMARTABAT”** dimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang mendukung pada *Misi 4* yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** serta mendukung pada pencapaian *tujuan* dari Misi 4 ini adalah **“Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik”** dengan salah satu *sasarannya* adalah **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Dengan hal tersebut selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang menyusun rencana strategis yang *bertujuan* untuk **“Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)”** dengan *indikator* **“Indeks SPBE”**. Dari tujuan rencana strategis dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Penerapan e-Government.

Indikator : Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi

2. Meningkatkan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik.

Indikator : Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan :										
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	1,5	1,81	1,81	2,98	2,61	3,01	3,41	3,41
Sasaran :										
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	54%	36,84%	47%	47,4%	50%	65%	80%	80%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	48,38%	51,61%	54,84%	56,45%	60%	80%	85%	85%

Sumber : P-Renstra Diskominfo, 2022

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2022

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab
Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,61	Bidang TIK
Sasaran				
1.	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	50%	Bidang TIK
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	60%	Bidang IKP dan Bidang Statistik dan Persandian

Berdasar pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2022 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 18.233.380.761,00 yang digunakan untuk melaksanakan 11 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.675.484.514,00
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.458.115.000,00
3.	Program Aplikasi Informatika	10.932.034.054,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	132.184.100,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	35.563.093,00
	Jumlah	18.233.380.761,00

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2022 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	13.769.776.311,00
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	4.463.604.450,00
	Jumlah	18.233.380.761,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Dalam penjabaran akuntabilitas tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*),

keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Pencapaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TUJUAN					
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,61	2,55	97,70%
SASARAN					
1.	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	50%	48,28%	96,56%
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	60%	78,22%	130,36%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Masing – masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter pencapaian, dapat dijelaskan aspek keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)*

Indikator : *Indeks SPBE*

**Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Tujuan**

No.	TUJUAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,98	2,61	2,55	97,70%

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Tujuan diperoleh gambaran bahwa Indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 97,70%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Perolehan nilai tingkat kematangan terdiri dari 47 indikator. Berikut merupakan perbandingan kematangan indikator di tahun 2021 dan di tahun 2022.

**Tabel 3.3.
Indikator Kematangan SPBE**

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3	3

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
	Layanan Pusat Data		
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	3	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	4	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	2
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	4	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4	4

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan SPBE dari Kemenpan RB, 2022

Keterangan :

- : mengalami penurunan
- : stagnan
- : mengalami peningkatan

Dari data di atas, sebanyak 19 indikator dari 47 indikator atau sekitar 40,41% indikator mengalami penurunan di tahun 2022. Lalu sebanyak 25 indikator dari 47 indikator atau sekitar 53,19% indikator memiliki nilai yang sama di tahun 2022. Dan sisanya yaitu sebanyak 3 indikator dari 47 indikator atau sekitar 6,38% mengalami peningkatan.

Melihat sebagian besar indikator mengalami penurunan, hal ini menjadi penyebab turunnya indeks SPBE. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan fokus memperbaiki indikator yang mengalami penurunan, sehingga diharapkan bisa mendongkrak kembali indeks SPBE di tahun berikutnya.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada.

3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :

Program Aplikasi infomatika dengan penambahan jaringan setiap

tahunnya, pemeliharaan website, pengamanan aplikasi untuk website, serta koordinasi secara berkesinambungan dengan OPD di Kabupaten Sampang.

Sasaran 1: Meningkatnya Penerapan e-Government

Indikator: Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	Persentase Pelayanan Publik berbasis elektronik	47,4%	50%	48,28%	96,56%

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 96,56%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Pada Program aplikasi informatika, semua OPD (Dinas/Badan dan Kecamatan) Sudah terkoneksi 100%. Kendala saat ini masih ada trouble dari Internet Service Provider, sering terjadi pemadaman listrik di kawasan Diskominfo sehingga tidak jarang menyebabkan kinerja server tidak optimal, putusnya kabel Fiber Optik. sering trouble perangkat wireless di setiap OPD mengalami penurunan kinerja dikarenakan faktor usia dan penurunan performa perangkat wireless.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan perangkat jaringan yang ada dengan melakukan perbaikan secara berkala sehingga tidak mengurangi fungsi dari peralatan tersebut, melakukan upgrade server, melakukan pembagian bandwidth tiap OPD secara proporsional sesuai dengan kebutuhan OPD, memaksimalkan SDM yang ada untuk menangani permasalahan terkait jaringan dan website.

- b. Pada kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabup untuk aspek kebijakan dan tata kelola sudah baik, sedangkan untuk

aspek layanan belum sepenuhnya layanan publik terintegrasi. Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan meningkatkan koordinasi untuk mengintegrasikan layanan publik yang ada.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada
3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
 - a. Program Aplikasi Informatika dengan penambahan jaringan setiap tahunnya, pemeliharaan website, pengamanan aplikasi untuk website, pengamanan aplikasi, serta koordinas yang berkesinambungan dengan OPD di Kabupaten Sampang.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator: Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas.

**Tabel 3.4.
Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

No.	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	85,73%	60%	78,22%	130,36%

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 130,36%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :
 1. Pada program informasi dan komunikasi publik masih ada OPD yang belum memahami mekanisme pelayanan informasi publik, Kurangnya Sarana dan prasarana serta kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam rangka menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat di lingkungannya. Walaupun demikian, pada program

ini terdapat kegiatan ADV terkait kegiatan bupati yang sangat mendongkrak capaian nilai pada sasaran 2 ini.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan meningkatkan kapasitas OPD dalam memahami mekanisme pelayanan informasi publik serta meningkatkan kapasitas anggota KIM.

2. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, semua dokumen statistik daerah dapat terpenuhi antara lain : Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, Tinjauan Ekonomi dan PDRB. Penyusunan data statistik masih bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, sehingga pelaksanaan kegiatan penyusunan data statistik menunggu kesiapan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait sehingga kegiatan penyusunan data statistik bisa disiapkan lebih awal

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sumber daya manusia yang terbatas di Bidang Statistik dan Persandian sehingga menggunakan staf di bidang lain. Namun untuk bidang IKP sudah memaksimalkan SDM yang ada.

3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
 - a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
 - b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan
Tahun- Tahun Sebelumnya

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI			
				2019	2020	2021	2022
Tujuan :							
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,61	1,81	1,81	2.98	2.55
Sasaran :							
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	50%	36,84%	47%	47,4%	48,28%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	60%	51,61%	54,84%	56,45%	78,22%

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Rentra

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Tujuan :					
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.41	2.55	74,78%
Sasaran :					
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	80%	48,28%	60,35

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI 2022	TINGKAT KEMAJUAN
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	85%	78,22%	92,02%

Dari Tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark* kinerja), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KET
Tujuan :					
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2.55	-	Tidak tersedia data
Sasaran :					
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	48,28%	-	Tidak tersedia data
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	78,22%	-	Tidak tersedia data

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.8.
Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	13.769.776.311,00	75,52
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	4.463.604.450,00	24,48

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp18.233.380.761,00 (termasuk anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung kedua sasaran). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcome dari masing masing sasaran strategis. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	50%	48,28%	96,56	13.769.776.311,00	13.448.539.008,00	97,67
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	60%	78,22%	130,36	4.463.604.450,00	4.207.273.287,00	94,26

Tabel 3.10.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	96,56	97,67	-1,11
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	130,36	94,26	36,1

Berdasarkan Tabel 3.10. di atas terlihat bahwa secara umum target kinerja Dinas Komunikasi Kabupaten Sampang Tahun 2022 dalam kategori berhasil. Walaupun ada 1 sasaran strategis yang keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan Kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar lebih dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat direalisasikan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA-Perubahan Tahun Anggaran 2022 anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp18.233.380.761,00 dan realisasi sebesar Rp17.655.812.295,00 dengan persentase 96,83%. Untuk kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022 setelah P-APBD sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah..... Rp. 100.000.000,00
 c. Belanja Daerah Rp. 18.233.380.761,00

Terdiri dari :

- (1) Belanja program penunjang/adum Rp 5.675.484.514,00
 (2) Belanja prioritas pembangunan Rp12.557.896.247,00

Tabel 3.14
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
BELANJA LANGSUNG	18.233.380.761,00	17.655.812.295,00	577.568.466,00	96,83
PROGRAM PENUNJANG	5.675.484.514,00	5.187.421.034,00	488.063.480,00	91,40
URUSAN PEMERINTAHAN				
DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Penyusunan Dokumen	987.450,00	986.950,00	500,00	99,95
Perencanaan Perangkat Daerah				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.005,00	190.000,00	5,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	712.470,00	712.450,00	20,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.975,00	84.500,00	475,00	99,44
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	989.009,00	987.500,00	1.509,00	99,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	228.414,00	228.000,00	414,00	99,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	675.620,00	675.000,00	620,00	99,91
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.975,00	84.500,00	475,00	99,44
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	988.459,00	987.000,00	1.459,00	99,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	228.414,00	228.000,00	414,00	99,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	675.070,00	675.000,00	70,00	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.975,00	84.000,00	975,00	98,85
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	984.425,00	983.900,00	525,00	99,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.005,00	190.000,00	5,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	709.445,00	709.400,00	45,00	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.975,00	84.500,00	475,00	99,44
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	989.925,00	988.000,00	1.925,00	99,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.005,00	190.000,00	5,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	714.945,00	714.000,00	945,00	99,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.975,00	84.000,00	975,00	98,85
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.365.141,00	4.138.000,00	227.141,00	94,80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	296.281,00	290.000,00	6.281,00	97,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	748.935,00	748.000,00	935,00	99,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	254.925,00	220.000,00	34.925,00	86,30
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.065.000,00	2.880.000,00	185.000,00	93,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.385.922.482,00	2.901.472.627,00	484.449.855,00	85,69
Belanja Gaji Pokok PNS	1.540.300.032,00	1.336.179.780,00	204.120.252,00	86,75
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	185.599.904,00	143.676.467,00	41.923.437,00	77,41
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.399.866,00	89.140.000,00	67.259.866,00	56,99
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	67.200.000,00	52.560.000,00	14.640.000,00	78,21
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.500.000,00	35.840.000,00	2.660.000,00	93,09
Belanja Tunjangan Beras PNS	112.600.096,00	90.090.480,00	22.509.616,00	80,01
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.075.200,00	39.574,00	8.035.626,00	0,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS	256.200,00	16.285,00	239.915,00	6,36
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.890.500,00	2.752.195,00	2.138.305,00	56,28
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.000.000,00	8.256.584,00	3.743.416,00	68,80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	960.750.684,00	849.521.262,00	111.229.422,00	88,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	230.250.000,00	224.300.000,00	5.950.000,00	97,42
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.977,00	2.980.000,00	19.977,00	99,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.232,00	190.000,00	232,00	99,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	349.745,00	340.000,00	9.745,00	97,21
Belanja Lembur	2.460.000,00	2.450.000,00	10.000,00	99,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	539.977,00	539.600,00	377,00	99,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.232,00	190.000,00	232,00	99,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	349.745,00	349.600,00	145,00	99,96
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	539.977,00	539.000,00	977,00	99,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.232,00	190.000,00	232,00	99,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	349.745,00	349.000,00	745,00	99,79
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	649.889,00	649.000,00	889,00	99,86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	245.749,00	245.000,00	749,00	99,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	404.140,00	404.000,00	140,00	99,97
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.451.743.832,00	1.450.172.678,00	1.571.154,00	99,89
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.803.352,00	1.800.000,00	3.352,00	99,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.158,00	1.088.000,00	7.158,00	99,35
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.370.150,00	49.370.000,00	150,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	352.000,00	350.000,00	2.000,00	99,43

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	774.972,00	550.000,00	224.972,00	70,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.100.000,00	300.000,00	96,43
Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.267.000.000,00	1.266.477.500,00	522.500,00	99,96
Belanja Tagihan Listrik	10.844.200,00	10.844.178,00	22,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	49.000.000,00	48.818.000,00	182.000,00	99,63
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.079.000,00	9.960.000,00	119.000,00	98,82
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.350.000,00	10.140.000,00	210.000,00	97,97
Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.783.345,00	17.773.000,00	10.345,00	99,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.008.370,00	1.008.000,00	370,00	99,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.774.975,00	16.765.000,00	9.975,00	99,94
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.443.834,00	35.375.000,00	68.834,00	99,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.468.834,00	26.460.000,00	8.834,00	99,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.975.000,00	8.915.000,00	60.000,00	99,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.392.989,00	43.357.500,00	35.489,00	99,92
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.073.193,00	26.052.500,00	20.693,00	99,92
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.518.720,00	1.510.000,00	8.720,00	99,43
Belanja Alat/Bahan untuk	6.875.000,00	6.870.000,00	5.000,00	99,93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Kegiatan Kantor-Benda Pos				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.926.076,00	8.925.000,00	1.076,00	99,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.432.650,00	39.432.000,00	650,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.432.650,00	39.432.000,00	650,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.268.328,00	270.190.419,00	77.909,00	99,97
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.380.328,00	22.344.000,00	36.328,00	99,84
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.610.000,00	5.600.000,00	10.000,00	99,82
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	213.318.000,00	213.316.419,00	1.581,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.400.000,00	12.370.000,00	30.000,00	99,76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.702.825,00	179.547.860,00	154.965,00	99,91
Belanja Tagihan Air	13.542.375,00	13.499.870,00	42.505,00	99,69
Belanja Tagihan Listrik	164.760.450,00	164.725.813,00	34.637,00	99,98
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.400.000,00	1.322.177,00	77.823,00	94,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.300.000,00	66.861.000,00	1.439.000,00	97,89
Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.300.000,00	12.861.000,00	1.439.000,00	89,94
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
Pemeliharaan Mebel	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.458.115.000,00	1.446.341.820,00	11.773.180,00	99,19
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.450.062.980,00	1.438.534.420,00	11.528.560,00	99,20
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.705.709,00	15.681.000,00	24.709,00	99,84
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.047.500,00	27.841.600,00	205.900,00	99,27
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.700.000,00	30.225.000,00	1.475.000,00	95,35
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	372.000.000,00	370.500.000,00	1.500.000,00	99,60
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	468.000.000,00	468.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	2.999.775,00	225,00	99,99
Belanja Sewa Hotel	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Belanja Sewa Musik Lainnya	5.000.000,00	4.999.995,00	5,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	125.788.000,00	125.787.600,00	400,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.275.000,00	54.465.000,00	5.810.000,00	90,36
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.994.000,00	6.000,00	99,90
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.178.935,00	143.073.450,00	105.485,00	99,93
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	70.400.000,00	70.096.500,00	303.500,00	99,57
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.499.000,00	13.320.000,00	179.000,00	98,67
Belanja Modal Personal	88.514.766,00	88.275.000,00	239.766,00	99,73

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Computer				
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.304.070,00	17.275.500,00	28.570,00	99,83
Pelayanan Informasi Publik	5.517.020,00	5.380.400,00	136.620,00	97,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	277.020,00	275.400,00	1.620,00	99,42
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.900.000,00	3.800.000,00	100.000,00	97,44
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.340.000,00	1.305.000,00	35.000,00	97,39
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.535.000,00	2.427.000,00	108.000,00	95,74
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	550.000,00	542.000,00	8.000,00	98,55
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	825.000,00	75.000,00	91,67
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.085.000,00	1.060.000,00	25.000,00	97,70
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	10.932.034.054,00	10.854.828.491,00	77.205.563,00	99,29
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	8.269.838.629,00	8.194.809.485,00	75.029.144,00	99,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	425.782,00	425.000,00	782,00	99,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.026.025,00	1.026.000,00	25,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	221.047.525,00	220.748.058,00	299.467,00	99,86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.931.960,00	5.914.080,00	17.880,00	99,70
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00	95,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	91.000.000,00	90.891.240,00	108.760,00	99,88
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.600.000,00	2.200.000,00	400.000,00	84,62
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.857.110,00	32.670.000,00	187.110,00	99,43
Belanja Modal Mebel	177.821.650,00	177.100.500,00	721.150,00	99,59
Belanja Modal Alat Pendingin	11.373.615,00	11.373.615,00	0,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	314.749.650,00	314.740.500,00	9.150,00	100,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	15.369.750,00	15.367.950,00	1.800,00	99,99
Belanja Modal Kursi Kerja	218.535.075,00	218.530.000,00	5.075,00	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Pejabat				
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.324.000.000,00	2.317.796.506,00	6.203.494,00	99,73
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	368.546.000,00	368.500.000,00	46.000,00	99,99
Belanja Modal Sumber Tenaga	271.411.000,00	271.409.211,00	1.789,00	100,00
Belanja Modal Personal Computer	133.161.274,00	133.155.600,00	5.674,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	55.418.750,00	55.333.500,00	85.250,00	99,85
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.814.163.463,00	3.747.527.725,00	66.635.738,00	98,25
Belanja Modal Software	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.662.195.425,00	2.660.019.006,00	2.176.419,00	99,92
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.066.444,00	12.031.220,00	35.224,00	99,71
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.400.000,00	10.336.500,00	63.500,00	99,39
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.096.165,00	5.095.750,00	415,00	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.301.195,00	2.300.400,00	795,00	99,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	64.025.275,00	63.995.080,00	30.195,00	99,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	142.744,00	140.600,00	2.144,00	98,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	743.240,00	732.000,00	11.240,00	98,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.022.000,00	7.936.000,00	86.000,00	98,93
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.805.000,00	20.797.300,00	7.700,00	99,96
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000,00	13.900.000,00	100.000,00	99,29
Belanja Jasa Tenaga Ahli	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	99.650.250,00	349.750,00	99,65
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.332.000.000,00	1.331.695.000,00	305.000,00	99,98
Belanja Sewa Komputer Jaringan	80.000.000,00	79.986.600,00	13.400,00	99,98
Belanja Sewa Serial	112.250.000,00	111.687.340,00	562.660,00	99,50
Belanja Jasa Konsultansi	18.350.000,00	18.315.000,00	35.000,00	99,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Berorientasi Bidang-Telematika				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.913.000,00	116.734.323,00	178.677,00	99,85
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.350.000,00	42.325.000,00	25.000,00	99,94
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.782.892,00	1.780.440,00	2.452,00	99,86
Belanja Modal Switcher/Menara Antena	35.862.750,00	35.858.550,00	4.200,00	99,99
Belanja Modal Personal Computer	27.096.300,00	26.950.000,00	146.300,00	99,46
Belanja Modal Peralatan Jaringan Komputer Lainnya	302.108.920,00	302.044.653,00	64.267,00	99,98
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.229.500,00	22.077.000,00	152.500,00	99,31
PROGRAM	132.184.100,00	131.939.000,00	245.100,00	99,81
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	94.627.050,00	94.469.000,00	158.050,00	99,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.934.505,00	2.900.000,00	34.505,00	98,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.035.945,00	8.000.000,00	35.945,00	99,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.491.600,00	1.485.000,00	6.600,00	99,56
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000,00	39.960.000,00	40.000,00	99,90
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.275.000,00	9.234.000,00	41.000,00	99,56
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	100,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	37.557.050,00	37.470.000,00	87.050,00	99,77
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	509.850,00	500.000,00	9.850,00	98,07
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	497.200,00	420.000,00	77.200,00	84,47
Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
PROGRAM	35.563.093,00	35.281.950,00	281.143,00	99,21
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
Penyediaan Layanan	35.563.093,00	35.281.950,00	281.143,00	99,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.195.488,00	1.195.000,00	488,00	99,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	849.750,00	849.750,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.259.855,00	1.243.000,00	16.855,00	98,66
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	3.977.000,00	23.000,00	99,43
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.408.000,00	26.167.200,00	240.800,00	99,09
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	18.233.380.761,00	17.655.812.295,00	577.568.466,00	96,83

D. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun 2021

Saran Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>a. Perencanaan Kinerja</p> <p>1) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;</p> <p>2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran agar memacu pada dokumen Renstra;</p> <p>3) Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward &</p>	<p>Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di antaranya sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan Kinerja</p> <p>1) Reviu Renstra Diskominfo secara berkala mulai dari indikator yang relevan dan sasaran yang sesuai dengan isu strategis</p> <p>2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran agar memacu pada dokumen Renstra</p>

Saran Rekomendasi	Tindak lanjut
punishment.	3) Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
<p>b. Pengukuran Kinerja</p> <p>1) Kualitas Pengukuran Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi.</p> <p>2) Implementasi Pengukuran Memonitor pencapaian target kinerja eselon III dan IV</p>	<p>b. Pengukuran Kinerja</p> <p>1) Pengukuran Kinerja Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.</p> <p>2) Melakukan Implementasi Pengukuran Memonitor pencapaian target kinerja eselon III dan IV</p>
<p>c. Pelaporan Kinerja</p> <p>Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja</p>	<p>c. Pelaporan Kinerja</p> <p>Laporan kinerja telah menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja</p>
<p>d. Evaluasi Internal</p> <p>1) Lakukan pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan</p> <p>2) Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk peningkatan implementasi SAKIP.</p>	<p>d. Evaluasi Internal</p> <p>1) Telah Lakukan pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan</p> <p>2) Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk peningkatan implementasi SAKIP.</p>



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2022, pada tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik mendapat predikat nilai **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata kinerja mencapai **100%**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.